LAPORAN CAPAIAN KINERJA
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
POLITIK LUAR NEGERI

KATAPENGANTAR

Ungkapan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahunan TA 2019 dapat tersusun. Sebagai salah satu unit koordinasi yang berada di lingkup Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berkewajiban menyusun Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 13, Bab IV dalam Peraturan MENPAN-RB No.29 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri bertujuan untuk :

a. Sarana bagi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban kinerja;

b. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal penguatan politik luar negeri Indonesia di dunia Internasional.

Suksesnya program kegiatan yang telah terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana menjadi tolak ukur keberhasilan untuk kegiatan di masa yang akan datang, namun demikian hambatan dan kendala selama Tahunan TA 2019 ini akan menjadi bahan evaluasi pada

perbaikan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahunan TA 2019 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan evaluasi kinerja guna penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2020
Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri

Lutfi Rauf

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Amerika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional dan Sekretaris Deputi.

Politik Luar Negeri merupakan arah kebijakan atau strategi suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional negara dalam lingkup dunia internasional. Untuk menciptakan hubungan internasional tersebut diperlukan sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas diplomasi dan kerjasama luar negeri Indonesia serta terselenggaranya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah Meningkatnya Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Luar Negeri Indonesia dengan indikator kinerja antara lain : Jumlah Kerja Sama Bilateral dan Regional Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan Negara Lain yang Ditindaklanjuti dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia, Jumlah Rekomendasi terkait sinkronisasi, sinergi dan pengendalian Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia, Jumlah Penanganan Permasalahan Bidang Politik Luar Negeri dan Jumlah Implementasi *Blueprint APSC* 2025.

Capaian lainnya yang harus dicapai selama Tahun 2019 adalah terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas dengan target berupa :

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Skala Likert 1-5)
2. Nilai akuntabilitas kinerja dengan target

Capaian Kinerja Tahunan TA. 2019 dapat terlihat dalam Tabel Capaian sebagaimana berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahunan
1) Meningkatnya Kualitas Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Indonesia	2) Jumlah Kerja Sama Bilateral dan Regional Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan Negara Lain yang Ditindaklanjuti dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia	7	7
	3) Jumlah Rekomendasi terkait sinkronisasi, sinergi dan pengendalian Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia.	2	2
	4) Jumlah Penanganan Permasalahan Bidang Politik Luar Negeri	2	2
	5) Jumlah Implementasi *Blueprint APSC* 2025;	5	5
2) Terwujudnya daya Dukung Manajemen Unit Organisasi yang berkualitas	a. Nilai Akuntabilitas	75	76,08
	b. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Skala Likert 1-5)	4	4

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahunan TA. 2019 disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahhunan TA. 2019 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2018. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam.

B. TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Asia dan Pasifik;

4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Afrika;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Timur Tengah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Amerika;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Eropa;
8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ASEAN;
9. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Multilateral;
10. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Politik Luar Negeri;
11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidkoor Pollugri;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidkoor Pollugri melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Hukum dan HAM;
5. Kementerian Kominfo;
6. Kementerian PAN & RB;
7. Kejaksaan Agung;

8. Badan Intelijen Negara
9. Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepolisian Negara RI;
11. Instansi lain yang dianggap perlu.

C. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

BerdasarkanPeraturan Menko Polhukam Nomor : 4 Tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh 4 (empat) orang Pejabat Eselon II yang terdiri dari:
   a. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
   b. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
   c. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN;
   d. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional;
2. Masing-masing asisten Deputi dibantu oleh 2 orang Bidang Kerjasama Bilateral ASEAN, Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik, Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah, Bidang Kerjasama Amerika, Bidang Kerjasama Eropa, Bidang Kerjasama Organisasi Internasional PBB, Bidang Kerjasama Organisasi Internasional Non PBB dan Antar Kawasan.
3. Sekretariat atau Tata Usaha, terdiri dari 1 (satu orang) Sekretaris Deputi setingkat Eselon II dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, 5 orang Analis, 3 orang Pengadministrasi umum, 1 orang CPNS dan 3 orang Staf PPNPN Sekretariat.

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDKOOR POLLUGRI

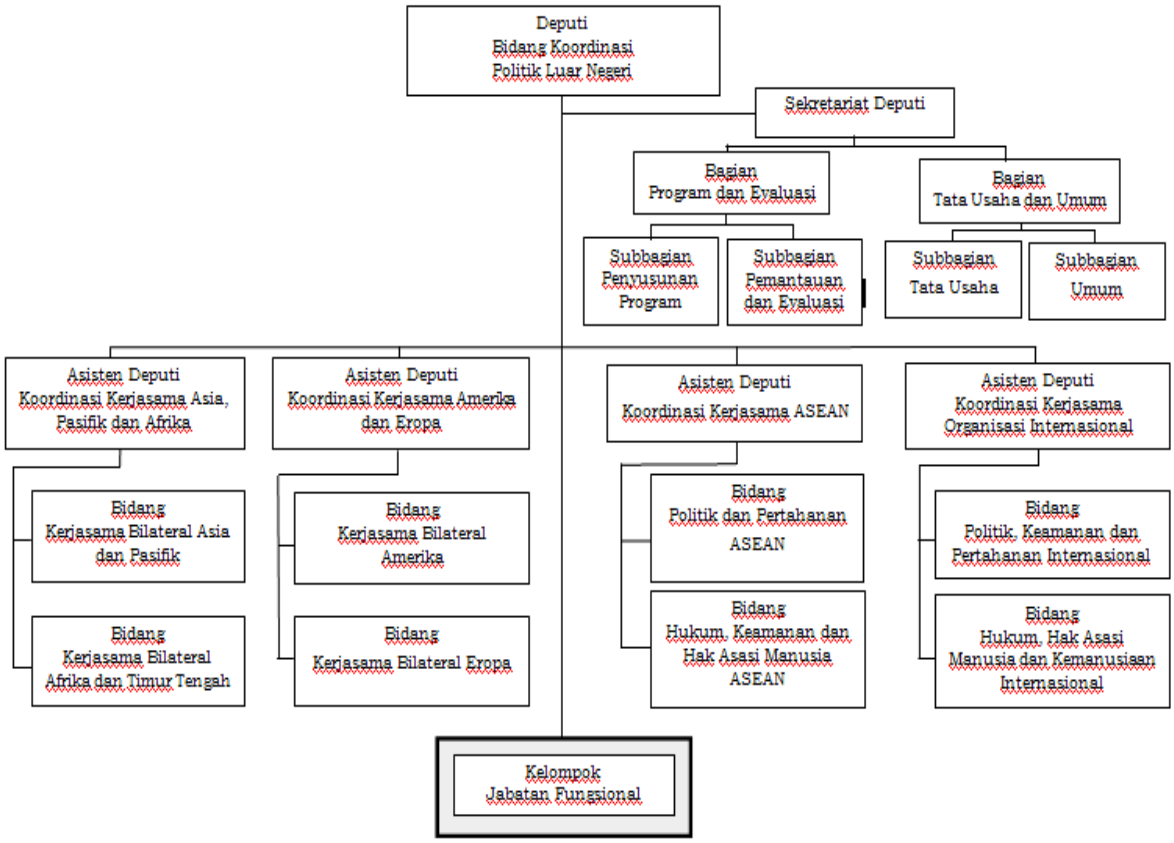

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik Luar Negeri.

E. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama yang ditangani oleh Kedeputian bidang Politik Luar Negeri adalah :

a. Kuatnya arogansi sektoral;
b. Perlunya penguatan tata kerja koordinasi dan sinkronisasi antara Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dengan Kementerian teknis terkait;
c. Masih adanya potensi separatisme dan terorisme yang menjadi paham sebagian kelompok tertentu yang menunggu kedaulatan bangsa dan Negara.

F. SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA

1. Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri TA. 2019 sebesar Rp. 11.850.000.000,-. Anggaran untuk dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Kode	Uraian	Jumlah	Total
5907	Sekretaiat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Rp. 1.500.000.000	Rp 11.850.000.000
2454	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	Rp. 2.701.808.000	
2455	Koordinasi Kerjasama ASEAN	Rp. 2.964.924.000	
2456	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	Rp. 2.893.979.000	
5896	Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional	Rp. 1.789.289.000	

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh:

1. Sekretariat Deputi;
   - 1.1. Bagian Program dan Evaluasi
     - 1.1.1. Subbagian Penyusnan Program;
     - 1.1.2. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi
   - 1.2. Bagian Tata Usaha dan Umum
     - 1.2.1. Subbagian Tata Usaha;
     - 1.2.2. Subbagian Umum
2. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
   - 2.1. Bidang Kerjasama Bilateral Asia dan Pasifik;
   - 2.2. Bidang Kerjasama Bilateral Afrika dan Timur Tengah
3. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
   - 3.1. Bidang Kerjasama Bilateral Amerika
   - 3.2. Bidang Kerjasama Bilateral Eropa
4. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN
   - 4.1. Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN;
   - 4.2. Bidang Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia ASEAN
5. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional
   - 5.1. Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional;
   - 5.2. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
   - 6.1. Fungsional Tertentu;
   - 6.2. Fungsional Umum.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya,penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Deputi Bidkoor Pollugri 2015-2019 mencakup visi, misi, program dan Indikator Kinerja. Rencana strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidkoor Pollugri menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka **Visi** Deputi Bidkoor Pollugri adalah

"Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pengendalian Kebijakan Politik Luar Negeri Dalam Rangka Terciptanya Diplomasi Yang Efektif Untuk Mewujudkan Keamanan Nasioanal Dan Kedaulatan Wilayah Dalam Masyarakat Yang Demokratis Berlandaskan Hukum"

Guna mewujudkan visi tersebut, Sekretarias Deputi Bidkoor Pollugri menetapkan **Misi** yang diharakan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan yaitu

"Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, Perumusan Kebijakan Serta Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Politik Luar Negeri"

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidkoor Pollugri dalam pembangunan bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2019 adalah

a) Tercapainya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi diplomasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang politik, hokum dan keamanan.
b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kemenko Polhukam dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi diplomasi pada kebijakan bidang politik, hokum dan keamanan.

2. Strategis Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tersebut maka disusunlah sasaran strategis dbeserta indicator untuk lima tahun kedepan yaitu

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama

Deputi BidKoor Pollugri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA UTAMA
Meningkatnya kualitas diplomasi dan kerjasama luar negeri Indonesia serta terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase Kerjasama Luar Negeri Indonesia dengan negara lain yang ditindaklanjuti dan berdampak terhadap Indonesia
	2. Persentase diplomasi Indonesia yang sukses
	3. Jumlah permasalahan antar negara yang teredam
	4. Implementasi Blueprint APSC 2025
	5. Persentase penurunan jumlah temuan
	6. Presentase realisasi penyerapan anggaran
	7. Nilai Akuntabilitas Kinerja

B. PERJANJIAN KINERJA

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi BidangKoordinasi Politik Luar Negeri tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Indonesia	a. Jumlah Kerja Sama Bilateral dan Regional Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan Negara Lain yang Ditindaklanjuti dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia	7
	b. Jumlah Rekomendasi terkait sinkronisasi, sinergi dan pengendalian Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia.	2
	c. Jumlah Penanganan Permasalahan Bidang Politik Luar Negeri	2
	d. Jumlah Implementasi *Blueprint APSC* 2025;	5
Terwujudnya daya Dukung Manajemen Unit Organisasi yang berkualitas	a. Nilai Akuntabilitas	75
	b. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Skala Likert 1-5)	4

Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidkoor Pollugri Tahun 2019 tersebut diimplementasikan melalui program peningkatan koordinasi bidang Pollugri dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi

kebijakan dan sasaran meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan bidang Pollugri. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan melalui:

1. Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
2. KoordinasikerjasamaAmerika Eropa
3. Koordinasikerjasama ASEAN
4. KoordinasikerjasamaOrganisasiInternasional

Jumlah Anggaran yang dialokasikandalamrangkamendukung kegiatan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah sebesar Rp. 11.850.000.000,- (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan 2019

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri pada Tahunan TA 2019 per tanggal 31 Desember 2019 dapat terlihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi Tahunan	% Realisasi
1. Meningkatnya Kualitas Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Indonesia	1) Jumlah Kerja Sama Bilateral dan Regional Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan Negara Lain yang Ditindaklanjuti dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia	7	7	100%
	2) Jumlah Rekomendasi terkait sinkronisasi, sinergi dan pengendalian Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia.	2	2	100%
	3) Jumlah Penanganan Permasalahan Bidang Politik Luar Negeri	2	2	100%
	4) Jumlah Implementasi *Blueprint APSC* 2025;	5	5	100%
2. Terwujudnya daya Dukung Manajemen Unit Organisasi yang berkualitas	5) Nilai Akuntabilitas	75	76,08	101,44%
	6) Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Skala Likert 1-5)	4	4	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahunan TA 2019

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri pada Tahunan 2019 sesuai dengan Perjanjian Kinerja

didukung oleh Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- **Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Luar Negeri Indonesia**

INDIKATOR KINERJA I	**JUMLAH KERJA SAMA BILATERAL DAN REGIONAL BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN DENGAN NEGARA LAIN YANG DITINDAKLANJUTI DALAM MENDUKUNG SUKSESNYA DIPLOMASI INDONESIA**

Salah satunya adalah capaian mengenai upaya diplomasi Indonesia dengan penguatan kerjasama baik di bidang ekonomi,politik, hukum, keamanan dan segala bidang. Untuk itu, menjadi hal yang penting untuk melakukan Kerjasama baik bilateral dan regional yang dalam hal ini di bidang politik, hukum dan keamanan dalam mendukung suksesnya diplomasi indonesia. Adapun diplomasi secara sederhana merupakan langkah teknis dalam upaya mencapai kepentingan nasional. Diplomasi pada umumnya diletakkan dalam kerangka relasi antara kebutuhan domestik dan realitas internasional.

Dalam rangka mendukung suksesnya diplomasi Indonesia, maka Indonesia perlu melakukan Kerjasama, untuk itu Kemenko Polhukam melakukan koordinasi terkait kebutuhan Kerjasama dalam rangka meningkatkan jumlah kerjasama bilateral dan regional yang mana pada tahun 2019 telah ***terjadi 7 kerjasama*** yang diantaranya adalah:

1) Sinergitas program kerja UNDP di bidang penanggulangan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme dengan Kementerian/Lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK

Sebagai bagian dari upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kerja sama bilateral dan regional bidang politik, hukum dan keamanan dengan negara-negara di kawasan Asia, Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti dalam mendukung diplomasi Indonesia, khususnya dalam bidang kerja sama penanggulangan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme, Kemenko Polhukam menyampaikan sinergitas program kerja organisasi internasional di kawasan, yakni *United Nation Development Programme* (UNDP) Indonesia di bidang penanggulangan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme dengan Kementerian/Lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK.

Koordinasi yang dilakukan Kemenko Polhukam dengan Kemenko PMK dan UNDP Indonesia dilalui dengan beberapa kali pertemuan membahas "*Preventing Violent Extremism through Tolerance and Respect for Diversity* (PROTECT)" dari *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Annual Work Plan* (AWP) *Workshop for PROTECT Project UNDP* 2019. Dengan adanya sinergitas yang telah dilakukan dapat meningkatkan kerja sama Pemerintah RI dengan organisasi internasional di kawasan dalam menanggulangi radikalisme, ekstrimisme dan terorisme di Indonesia.

<u>Tindak Lanjut:</u>

Rekomendasi ditindaklanjuti melalui sinergi program dan peran aktif K/L dalam kegiatan yang difasilitasi oleh UNDP terkait dengan *countering violent extremism* (CVE) antara lain:

1) *Research Design Workshop: "The Role of Moderate Islamic Organization in Prevention of Violent Extremism: Case Study of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah"* 8 Maret 2019, Jakarta;
2) *National Workshop on PROTECTing Indonesia from Violent Extremism Through Promoting Tolerance and Respect for Diversity*

and Official Launching of PROTECT project, 14 Maret 2019, Jakarta;

3) *Research Design Workshop: "The level of radicalization in state-owned University Mosque in Indonesia"* 22 Maret 2019;
4) *Research Design Workshop: "Research on the Impact of Regional Dynamic of Violent Extremism on Islam Communities in Indonesia",* 27 Maret 2019.

Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang ditemukan yitu banyak program di K/L dalam penanganan CVE yang *overlapping* antara satu instansi dengan instansi lainnya. Di sisi lain masih ada isu yang belum mendapatkan perhatian dari seluruh K/L terkait, seperti isu *gender* dalam CVE. Hal ini menjadi tantangan dalam sinergi program kerja Pemri dengan program organisasi internasional di kawasan seperti UNDP.

2) Melakukan Kerjasama dengan Global Geopark Network UNESCO dalam Penyusunan Master Plan Geopark Natuna

Kemenko Polhukam dan BPPK Kemlu saat ini sedang melakukan inisiasi pengembangan Kepulauan Natuna sebagai sebagai situs baru *Geopark* Nasional dan *Global Geopark Network UNESCO*.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan *geopark* Kepulauan Natuna tersebut antara lain melakukan koordinasi mengenai sinergi pengelolaan tata ruang Kepulauan Natuna dalam konteks pengembangan pertahanan, potensi ekonomi, dan aset konservasi kemaritiman serta melakukan pertemuan dan pengumpulan data mengenai sinergi kegiatan pertahanan dan ekonomi dalam mengembangkan Kepulauan Natuna

sebagai situs *Geopark* Nasional dan *Global Geopark Network UNESCO* di Hawaii.

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri bersama Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kemenko Kemaritiman, Kemlu, Kemhan, Kemendagri, Kemen ATR/BPN, Bappenas, Arsenum TNI, Setda Pemprov Riau, Dinas Pariwisata dan Dinas PU Kabupaten Natuna, Badan Pengelola Geopark Natuna dan Universitas Padjajaran Bandung menyepakati bahwa pengembangan *Geopark UNESCO* Kepulauan Natuna merupakan prioritas nasional sebagai bagian dari pembentukan tata ruang sistem pertahanan NKRI yang mendukung pengembangan perekonomian, pariwisata dan konservasi alam Kepulauan Natuna. Ditargetkan pada bulan Juli 2019 Indonesia akan menyampaikan *Letter of Intent* (LoI) kepada UNESCO terkait usulan Kepulauan Natuna sebagai situs *Geopark UNESCO* dan permohonan kunjungan tim UNESCO ke Natuna bulan Juni-Agustus 2019. Adapun target pendaftaran Kepulauan Natuna sebagai situs *Geopark UNESCO* adalah bulan November 2019.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Kemenko Polhukam merekomendasikan penunjukan *focal point* dari Kementerian/Lembaga terkait yang bertugas membantu upaya revisi tata ruang Natuna yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemkab Natuna serta penyusunan *master plan geopark* termasuk pemetaan zona pertahanan/militer di Kepulauan Natuna.

Tindak Lanjut:

Dilakukannya percepatan proses revisi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kepulauan Natuna dan sinergi langkah K/L terkait bagi pengusulan Kepulauan Natuna sebagai *Geopark* dunia melalui mekanisme *UNESCO Global Geopark.* Rapat dilaksanakan oleh

Kemenko Polhukam bekerja sama dengan BPPK Kemlu bersama dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah. Namun adanya kendala jarak dan proses birokrasi antara pusat dan daerah dalam koordinasi penyusunan *Master Plan* antara K/L dan Pemerintah Daerah serta terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan *Master Plan.* Untuk itu, Kemenko Polhukam dan BPPK Kemlu terus bekerja sama dalam menindaklanjuti upaya penetapan Kepulauan Natuna sebagai *UNESCO Global Geopark* melalui rapat koordinasi dan forum dialog antara Pemerintah Daerah dengan K/L di pusat. Kemlu juga memberikan dukungan pengembangan Kepulauan Natuna sebagai *UNESCO Global Geopark* melalui promosi investasi di Kepulauan Natuna baik di dalam maupun luar negeri.

3) Program kerja sama RI-Myanmar

Sebagai salah satu upaya tindak lanjut dari program kerja sama RI-Myanmar di bidang politik, hukum dan keamanan, Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Universitas Pertahanan dan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia dalam pemberian bantuan beasiswa kepada siswa dari Myanmar untuk mengikuti pendidikan lanjutan bidang pertahanan di UNHAN.

Pihak Kedutaan Besar Myanmar telah mengirimkan nama peserta pendidikan lanjutan di UNHAN a.n Ms. Khine Zar Li jabatan *Staff Officer* dari *Office of the State Counselor Republic of the Union Myanmar.* Untuk pengusulan tersebut, pihak Myanmar mengharapkan kiranya Indonesia dapat pula menanggung biaya transportasi (return air ticket) dari Myanmar-Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti hal ini, Kemenko Polhukam telah menyampaikan rekomendasi kepada Kemlu untuk kiranya dapat membantu pembiayaan transportasi siswa Myanmar

dimaksud. Selain itu, Kemenko Polhukam juga menyampaikan rekomendasi kepada Kemhan untuk dapat menerbitkan surat pernyataan penerimaan (*Letter of Acceptance)* kepada calon siswa dari Myanmar, sebagai peserta pendidikan bahasa Indonesia di Pusat Bahasa Kemhan dan sebagai peserta pendidikan lanjutan di UNHAN.

Tindak Lanjut:

Pihak Kemlu dan Kemhan telah menerima rekomendasi yang diberikan Kemenko Polhukam dan saat ini sedang memproses kemungkinan pemberian bantuan dukungan biaya transportasi bagi siswa dari Myanmar serta memproses penerimaan siswa Myanmar sebagai peserta pendidikan lanjutan dari UNHAN. Namun, belum adanya anggaran khusus dari Pemri dalam mendukung kebutuhan pembiayaan tambahan (dalam hal ini biaya transportasi) siswa Myanmar untuk melaksanakan studi di Indonesia. Untuk itu, Kemenko Polhukam akan terus berkoordinasi dengan Kemlu dan Kemhan dalam penanganan permintaan bantuan pembiayaan bagi siswa Myanmar, khususnya dalam mengeksplorasi kemungkinan pembiayaan melalui program kerja sama teknik ataupun program lainnya.

4) Kerjasama bilateral RI-Jepang khususnya di bidang hukum dan keamanan melalui pembentukan mekanisme Forum Konsultasi Bilateral RI-Jepang di tingkat Menteri Koordinator.

Delegasi Kemenko Polhukam telah melaksanakan Pertemuan Penjajagan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Menko Polhukam RI-*National Security Secretariat (NSS)* pada 25-26 Maret 2019 di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil beberapa kali kunjungan NSS ke Indonesia dan dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi format dan isu-isu keamanan yang terus

berkembang dewasa ini sebagai agenda pembahasan forum konsultasi bilateral kelak.

Dalam kesempatan pertemuan, pihak Jepang menyampaikan *briefing* mengenai analisis isu-isu keamanan yang dihadapi Jepang antara lain ekspansi maritim Tiongkok di Laut China Timur, Laut China Selatan serta isu-isu di wilayah lainnya seperti Kamboja dan Samudra Hindia melalui proyek *Belt and Road Initiative*.

Kedua pihak sepakat bahwa hubungan bilateral kedua negara perlu untuk ditingkatkan dan perlu melingkupi isu-isu tentang hukum dan keamanan dan dalam rangka menghadapi tantangan keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik tersebut, dan juga dalam menyelesaikan masalah bilateral kedua negara, kiranya FKB Menko Polhukam dan NSS perlu segera diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disusun rekomendasi berupa berita rahasia dari Deputi Bidkoor Pollugri kepada Wakil Menteri Luar Negeri dan Menko Polhukam terkait pentingnya peningkatan kerja sama RI-Jepang mengenai perkembangan di kawasan Laut China Timur dan Laut China Selatan serta masalah stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik.

Tindak Lanjut:

Melakukan pelaksanaan pertemuan teknis tingkat Eselon II antara Kemenko Polhukam dengan NSS Jepang, Kemlu dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Namun, terdapat kendala birokratis dari pihak Jepang dimana sampai saat ini pihak Pemerintah Jepang masih mencari *counterpart* Menko Polhukam yang dapat mengkoordinasikan kementerian serta lembaga di bidang keamanan dalam mekanisme FKB. Untuk itu, Kemenko Polhukam dan NSS Jepang serta Kedutaan Besar Jepang di Indonesia sedang berkoordinasi untuk memformulasikan format pertemuan yang

dapat membantu pihak Jepang mengatasi kendala birokratis dalam pertemuan FKB nantinya.

5) Kerja Sama *Transfer Defence Equipment and Technology* antara Jepang dan Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Pertemuan Penjajagan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Menko Polhukam RI-*National Security Secretariat* (NSS) Jepang pada 25-26 Maret 2019 di Tokyo, Jepang, khususnya koordinasi dan sinkronisasi kelanjutan proses pembuatan perjanjian *Transfer Defence Equipment and Technology* antara Jepang dan Indonesia, Kemenko Polhukam telah mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Jepang dan Kementerian Pertahanan RI dalam rangka membahas koordinasi dan sinkronisasi kelanjutan proses pembuatan perjanjian *Transfer Defence Equipment and Technology* dimaksud.

Pada Pertemuan Penjajakan FKB Menko Polhukam RI-*NSS* Jepang, pihak Jepang menginformasikan tentang kelanjutan proses pembuatan perjanjian kerja sama *Transfer Defence Equipment and Technology* antara Indonesia dengan Jepang. Kerja sama ini juga dibahas melalui mekanisme *Japan Indonesia Politico and Military Talks* (Pertemuan 2+2 Menlu-Menhan).

Ditkersin Ditjen Strahan pada tanggal 10 Agustus 2016 telah mengadakan rapat dan sepakat untuk membentuk tim untuk bahas usulan Jepang, dan identifikasi alutsista atau teknologi yang akan dikerjasamakan. Rapat juga bahas tentang perlu adanya payung hukum kerjasama dimaksud.

Jepang mengusulkan *draft Joint Working Group (JWG) on Defense Equipment and Technology Cooperation between Indonesia and Japan*, dan sesuai hasil rapat dimasukkan menjadi "*Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic*

of Indonesia Concerning the Transfer of Defense Equipment and Technology". Diskusi antara Indonesia – Jepang terkait *draft* dimaksud telah dilakukan (pertemuan terakhir 1-3 Maret 2018 di Manado). *Focal Point* kerja sama adalah Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan.

Kedua negara memiliki kesamaan visi bahwa kerja sama ini ditujukan untuk membangun dan memajukan industri pertahanan Indonesia, sehubungan dengan itu, Kemenko Polhukam merekomendasikan agar perundingan dilanjutkan dan masing-masing pihak menyampaikan *stakeholder* terkait untuk mengkaji solusi yang bisa diterima kedua pihak untuk kendala-kendala teknis yang dihadapi kedua negara terkait perjanjian kerja sama *Transfer Defence Equipment and Technology* antara Indonesia dengan Jepang. Diharapkan tindak lanjut pembahasan kerja sama dapat disampaikan sebagai salah satu program dalam pertemuan 2+2 Menlu-Menhan mendatang yang direncanakan pada akhir tahun 2019.

<u>Tindak Lanjut:</u>

Pihak Jepang akan menyampaikan kepada pemerintah pusat (khususnya Kemhan Jepang) untuk mengkaji solusi yang bisa diterima pihak Indonesia untuk kendala-kendala teknis yang dihadapi kedua negara, sementara itu pihak Indonesia akan memberikan contoh perjanjian kerja sama di bidang transfer teknologi pertahanan yang pernah dilakukan Indonesia dengan negara lain sebagai referensi penyusunan perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan Jepang. Namun, pada Kedua negara memiliki mekanisme dan dasar hukum yang berbeda dalam penyelenggaraan Transfer Defence Equipment and Technology. Untuk itu, *Stakeholders* dari kedua negara dengan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi dari Kemenko Polhukam akan

melanjutkan perundingan dan alternatif solusi yang dapat diterapkan oleh kedua negara.

6) Kerja Sama RI-Australia di bidang Hukum dan Keamanan pada Pertemuan Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM RI-Australia) ke-6

Pada tanggal 8 November 2019 telah diadakan pertemuan *the 6th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security* (MCM RI-Australia ke-6) di Melbourne, Australia. Pertemuan dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait yaitu Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, BNPT, BIN, dan PPATK. Dalam kesempatan tersebut, telah diadakan pertemuan bilateral antara Menko Polhukam dengan Menteri Dalam Negeri Australia, the Hon. Peter Dutton, MP. Selain itu diadakan juga pertemuan bilateral antara Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri Australia, Marise Ann Payne. Pada pertemuan tersebut, dihasilkan beberapa kesepakatan terkait bidang yang akan dilakukan Kerjasama , antara lain:

- *Regional Security Environment*
  - Kedua negara menyampaikan apresiasi atas kemajuan hubungan bilateral yang terus meningkat di berbagai bidang.
  - Kedua negara menyadari perkembangan ancaman yang ada di kawasan regional, khususnya ancaman FTF dan isu-isu keamanan lintas batas dan menyepakati menyepakati pentingnya melanjutkan peningkatan kerja sama hukum, peningkatan *awareness* di perbatasan, pertukaran informasi intelijen dalam penanganan ancaman tersebut.
- ***Countering Terrorism and Violent Extremism***
  - Indonesia mengharapkan Pemerintah Australia dapat melarang eksistensi organisasi Hizbut Tahrir seperti yang

telah dilakukan Indonesia terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengingat organisasi ini mempunyai jaringan hampir di semua negara dan memiliki tujuan yang berbahaya bagi keutuhan bangsa.

- Perlunya kedua negara untuk bersama-sama menangani para *returnees* dan *relocators* FTF serta mengantisipasi berubahnya taktik para teroris melalui pertukaran informasi dan kerja sama di bidang intelijen serta membuat kebijakan dan program dalam kerangka identifikasi, repatriasi, deradikalisasi, rehabilitasi, reintegrasi para *returnees* dan *relocators* dengan memperhatikan keseimbangan antara penegakan keamanan nasional dan prinsip-prinsip perlindungan warga negara.
- Perlunya kerja sama yang didasarkan pada kebijakan dan kerja sama konkrit serta peningkatan kapasitas antara lain dalam kerangka *working group* untuk mengimplementasikan kerja sama yang sudah dicanangkan.

➢ ***Countering Transnational Crime and Financial Intelligence Cooperation***

- Kedua negara sepakat tentang pentingnya penegakan hukum dan peningkatan kerja sama dalam rangka pemberantasan kejahatan lintas negara (perdagangan anak, narkoba, perdagangan orang, pencucian uang dan lainnya) dan berkomitmen untuk memperkuat kerja sama peningkatan kapasitas terkait regulasi sistem keuangan, khususnya dalam menanggulangi kegiatan pendanaan terorisme.

- Pihak Australia menyatakan dukungan terhadap upaya Indonesia untuk dapat menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF).

➢ ***Other Business***

- Indonesia telah menyampaikan tentang rencana diadakannya *Sub Regional Meeting* pada paruh pertama tahun 2020.
- Tema yang akan diambil pada Pertemuan dimaksud kemungkinan adalah mengenai FTF dan *returnees* serta *relocators*, serta bagaimana negara-negara sub-regional dapat bekerjasama dalam menangani masalah ini.

Tindak Lanjut:

Berdasarkan hasil dari Pertemuan MCM RI-Australia ke-6 serta hasil koordinasi perwakilan Indonesia, Australia dan negara-negara sub-kawasan Asia Pasifik (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Singapura dan Thailand) dalam pertemuan Jakarta *Working Group,* Kemenko Polhukam akan menyelenggarakan pertemuan *3rd Sub Regional Meeting: Counter Terrorism and Transnational Security* bertempat di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 18-19 Februari 2020 yang akan fokus pada pembahasan penanganan FTF dan *returnees* serta *relocators*, serta bagaimana negara-negara sub-regional dapat bekerjasama dalam menangani masalah ini.

7) Kerja sama penanganan bencana, yang ditawarkan oleh Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia, dengan BNPB sebagai *focal point*

Kerjasama dihasilkan merupakan hasil pertemuan Kemenko Polhukam dengan Mr. Andrey E. Kryukov, *Deputy Chief of Analysis*

and Advanced Planning Division, Rosoboronexport, serta Mr. Oleg Khramov, Deputi Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Federasi Rusia di sela-sela kunjungan kerja ke Ufa, Rusia pada 16-20 Juni 2019 dalam rangka menghadiri Pertemuan *The X International Meeting of High-Level Responsible for Security Matters*. Menindaklanjuti hasil kedua pertemuan tersebut, Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan BNPB dan BSSN guna menindaklanjuti usulan kedua kerja sama yang dimaksud melalui mekanisme kerja sama yang lebih teknis

Tindak Lanjut:

Terimplementasinya kerjasama dan kolaborasi dan sinergi dalam pengelolaan risiko untuk mendukung keamanan siber dapat saling menguntungkan kedua negara mengingat Indonesia tidak terikat dengan menjalankan politik bebas aktif. Adapun Delegasi Rusia juga menyampaikan harapan yang sama bahwa kerjasama ini dapat saling menguntungkan dan didasakan pada persahabatan tentunya hasilnya akan lebih baik. Pertemuan Indonesia-Rusia bidang Keamanan Informasi berjalan sukses dan penuh keakraban. Delegasi Rusia bahkan berencana menyempatkan diri mengunjungi museum sandi di bilangan Kota Baru Yogyakarta.

INDIKATOR KINERJA II	**JUMLAH REKOMENDASI TERKAIT SINKRONISASI, SINERGI DAN PENGENDALIAN KERJA SAMA MULTILATERAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENDUKUNG SUKSESNYA DIPLOMASI INDONESIA**

Diplomasi secara sederhana merupakan langkah teknis dalam upaya mencapai kepentingan nasional. Diplomasi pada umumnya diletakkan dalam kerangka relasi antara kebutuhan domestik dan realitas internasional. Namun demikian, konteks diplomasi menjadi

lebih bijak tatkala kepentingan nasional sebuah negara melebur sebagai komitmen bersama dalam sebuah organisasi supranasional. Inilah yang menjadi batu pijakan bagi Indonesia untuk tidak hanya bebas aktif, tapi juga kontributif melalui berbagai langkah nyata. Diplomasi Indonesia harus berdiri tegak, bermartabat memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia

Dalam lima tahun ke depan, diplomasi Indonesia diproyeksikan akan menjadi sangat sibuk. Indikasinya sangat jelas. Keanggotaan Indonesia di beberapa organisasi regional dan global akan menjadi lebih strategis karena menduduki jabatan kunci. Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023. Indonesia juga akan menjadi Ketua G-20, sebuah forum global yang beranggotakan negara-negara maju yang menguasai perekonomian dunia. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk lebih menggalakkan peran dan kontribusi sebagai sebagai anggota Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB, serta Organisasi Maritim Internasional. Untuk itu, dalam upaya realisasi proyeksi yang akan dilakukan dan suksesnya diplomasi Indonesia yang diinginkan, Kemenko Polhukam melakukan upaya dengan melakukan sinergi dan pengendalian dengan ***rekomendasi terkait Kerjasama multilateral dan organisasi yang mendukung suksesnya diplomasi Indonesia yang pada tahun 2019 telah menghasilkan 2 rekomendasi***. Adapun realisasi tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun kegiatan yang realisasinya ialah sebagai berikut:

1) Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi peningkatan hubungan dan kerja sama RI-Thailand dalam mengatasi masalah-masalah kejahatan lintas batas di Kawasan Pasifik Selatan.

   Delegasi Kemenko Polhukam dipimpin Sesmenko Polhukam Letjen TNI Agus Surya Bakti, M.I.Kom, telah melakukan kunjungan kerja ke Bangkok, Thailand pada 1 dan 2 Agustus 2019 untuk

melakukan pertemuan dengan *National Security Council Thailand* (NSC) dan *United Nations Office on Drugs and Crime Regional Representatives for Asia and Pacific* (UNODC) dalam rangka peningkatan hubungan dan kerja sama dalam mengatasi berbagai isu keamanan kawasan.

Pertemuan dengan NSC Thailand didasari pada penilaian posisi geografis Thailand yang banyak berpengaruh terhadap ancaman kejahatan lintas batas terhadap Indonesia. Sementara pertemuan dengan UNODC didasari pertimbangan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan program-program UNODC terhadap Indonesia dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas batas di kawasan.

Berdasarkan hasi pertemuan dengan NSC dan UNODC dimaksud, dalam rangka menghadapi tantangan keamanan di kawasan, disampaikan rekomendasi agar Indonesia dan Thailand menindaklanjuti berbagai pertemuan pejabat senior termasuk rekomendasi Komite Bersama Indonesia-Thailand untuk memulai *Indonesia-Thailand Security Dialogue* pada bulan November 2019 di Thailand dengan kepastian waktu dan tempatnya akan disampaikan lebih lanjut oleh NSC. Pertemuan nantinya akan membahas isu-isu prioritas bahasan di bidang keamanan dengan fokus pada kejahatan terorisme dan narkoba, penyelundupan manusia, disamping isu kejahatan siber, dan perkembangan situasi kawasan khususnya Laut Tiongkok Selatan, Rakhine State, Semenanjung Korea dan keamanan maritim lainnya. Dalam rangka memastikan kegiatan berjalan dengan baik maka Kemenko Polhukam melakukan peninjauan terhadap program-program Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan kejahatan lintas batas di kawasan guna memetakan prioritas Pemerintah Indonesia dalam peningkatan kapasitas dan kualitas insfrastruktur di bidang penanggulangan kejahatan lintas batas

untuk diajukan sebagai *deliverables* dalam pengembangan kerja sama dengan NSC Thailand dan UNODC.

Pada implementasinya terdapat ancaman kejahatan lintas batas di kawasan terus berkembang dan semakin kompleks, khususnya dalam hal terorisme dan perdagangan dan penyalahgunaan obat terlarang, sementara itu negara-negara di kawasan masih perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur dalam menanggulangi dinamika ancaman kejahatan lintas batas tersebut. Untuk itu, diperlukannya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur diharapkan dapat ditingkatkan melalui dialog keamanan Indonesia dan Thailand yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam dan NSC Thailand dengan melibatkan K/L terkait.

2) Rekomendasi peningkatan bantuan/komitmen kerja sama Pemerintah Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam rangka membangun dukungan negara-negara Pasifik terhadap kedaulatan RI

Sejak tahun 2018, Kedeputian Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada K/L terkait dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian upaya peningkatan bantuan/komitmen kerja sama Pemerintah Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, dalam rangka membangun dukungan negara-negara Pasifik terhadap kedaulatan RI.

Salah satu koordinasi upaya peningkatan komitmen yang ditindaklanjuti adalah permintaan Pemerintah Fiji untuk bantuan pembangunan kembali Queen Victoria School (QVS) yang mengalami kerusakan berat akibat diterpa Topan Winston pada Februari 2016.

Setelah bencana topan tersebut, pada bulan April 2019 Pemri telah membantu renovasi QVS. Namun demikian, saat ini gedung

sekolah tersebut rusak lagi, dan memerlukan banyak perbaikan/pembangunan. Bantuan finansial yang dibutuhkan guna pembangunan kembali QVS sebesar F$ 3.600.000 (atau sekitar USD 1.800.000). QVS yang dibangun pada 1906 dikenal sebagai sekolah elit yang telah menghasilkan para pemimpin dan tokoh terkemuka Fiji. Pada awalnya QVS memang didirikan bagi pendidikan para putra kalangan pejabat/bangsawan/kepala suku di Fiji. Namun saat ini QVS terbuka untuk penduduk asli Fiji dari kalangan lebih luas.

Bantuan renovasi QVS di Fiji memiliki manfaat politis yang besar bagi Indonesia. Selain Indonesia dan Fiji adalah mitra yang selalu saling mendukung dalam pemungutan suara di PBB, Fiji secara konsisten telah menunjukkan penghormatan integritas wilayah dan kedaulatan NKRI.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenko Polhukam melakukan koordinasi terkait kelanjutan Permintaan Bantuan Rehabilitasi Queen Victoria School (QVS) di Fiji nomor B-175/LN00.00/6/2019 tanggal 12 Juni 2019 menyampaikan rekomendasi kepada K/L terkait yang meliputi Kemlu, Kemenkeu, Kemsetneg, Kemdikbud dan BIN mengenai perlu kiranya diputuskan segera mengenai bantuan renovasi QVS tersebut dalam RPTM, mengingat hal ini menyangkut sumber dana dan prosedur pemberian bantuan yang sifatnya politis dan segera.

Direkomendasikan pula adanya guarantee of disbursement tentang kapan dana hibah tersebut dapat diberikan. Hal ini mengingat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing belum terdapat petunjuk pelaksanaannya.

Komitmen pemberian bantuan kepada Fiji mengandung manfaat dan nilai politis penting, sehingga perlu untuk segera direalisasikan. Sehubungan dengan itu, Kemenko Polhukam

menyampaian permohonan masukan dari Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko (PPR) c.q. Direktur Pinjaman dan Hibah Kemenkeu, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional KemenPPN/Bappenas, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri dan Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud serta Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kemsetneg guna terlaksananya komitmen pemberian bantuan tersebut. Adapun Kemlu telah menindaklanjuti rekomendasi Kemenko Polhukam dengan menyusun rincian rencana bantuan kepada negara-negara Pasifik antara lain Fiji, Tuvalu, Nauru, Kiribati dan Solomon Island untuk dimintakan anggaran kepada Kemkeu. Selanjutnya Menlu RI juga menyampaikan usulan bantuan Pemerintah RI kepada Pemerintah Fiji untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Queen Victoria School (QVS) kepada Presiden RI yang diikuti oleh usulan dari Kemenko Polhukam melalui surat nomor B-162/LN.00.00/9/2019 tanggal 11 September 2019.

Selain itu, Sekretaris Kabinet RI melalui surat nomor B. 0766/Polhukam/09/2019 tanggal 25 September 2019 telah menyampaikan kepada Deputi Bidkoor Pollugri bahwa Presiden RI telah menyetujui pemberian bantuah hibah kepada Pemerintah Fiji. Selain itu Presiden RI juga telah menyetujui pemberian bantuan kepada beberapa negara Pasifik lainnya yakni Nauru, Tuvalu, Solomon Islands, dan Kiribati. Pemerintah RI telah menyusun draft Grant Agreement (Perjanjian Hibah).

Diplomasi membutuhkan citra domestik yang kuat. Semua image yang dibangun di tataran internasional akan menjadi pudar apabila di level domestik stabilitas politik dan ekonomi tidak dapat dikendalikan dengan baik. Beberapa momen penting skala nasional yang dihelat tahun harus bisa dikelola dengan baik dan dikonversi menjadi modal diplomatik di panggung global. Dengan komitmen yang kuat serta

konsistensi dalam mewujudkan tujuan nasional melalui diplomasi, kiprah Indonesia diharapkan akan semakin bersinar terang.

INDIKATOR KINERJA III	JUMLAH PENANGANAN PERMASALAHAN BIDANG POLITIK LUAR NEGERI

Dalam perjalanan politik luar negeri Indonesia dan penyelenggaraan hubungan luar negeri sesungguhnya telah banyak hal yang dilakukan dan dicapai dengan baik. Penumbuhan penguatan citra Indonesia sebagai negara yang mampu memadukan dinamika penduduk yang mayoritas beragama Islam dan demokrasi, perhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional, penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diskriminatif, pendorongan pemulihan ekonomi yang lebih menjanjikan serta perlindungan warga negara yang konsisten, merupakan dasar-dasar kebijakan yang terus dikembangkan. Seluruh pencapaian itu sesungguhnya menjadi aset penting bagi pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia.

Disadari bahwa penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dihadapkan pada beberapa permasalahan yang salah satunya ialah perkembangan menarik dalam format hubungan internasional yang baru itu adalah mengemukanya peranan negara adidaya dalam percaturan politik internasional serta menguatnya kecenderungan upaya pembentukan “global governance”. Negara adidaya muncul menjadi kekuatan unilateral dalam berbagai penanganan permasalahan keamanan internasional. Langkah-langkah kebijakan dalam menjaga kesinambungan dan pemantapan peran politik luar negeri dan kerja sama internasional antara lain adalah meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional;

melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; dan menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional. Dengan demikian, diharapkan peran Indonesia semakin besar dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta secara bertahap memulihkan citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional. Untuk itu, dalam penanganan permasalahan bidang politik luar negeri sangat penting dilakukan. Adapun dalam ***penanganan permasalahan bidang politik luar negeri*** selama tahun 2019 telah, Kedeputian Bidkoor Polugri telah menghasilna 2 penanganan permasalahan bidang politik luar negeri dimana angka tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada awal tahun yaitu 2. Adapun realisasi tersebut ialah, sebagai berikut:

1) **Penanganan dalam Menghadapi Pelanggaran Kedaulatan RI di Wilayah *Undelimited Waters* dengan melakukan Penyusunan Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)**

   Sejak paruh awal tahun 2019 telah terjadi sejumlah insiden antar aparat penegak hukum Indonesia dan negara tetangga (khususnya Malaysia dan Vietnam) terkait dengan aktivitas kapal-kapal perikanan di wilayah perairan yang belum ditetapkan batasnya. Beberapa insiden tersebut antara lain melibatkan kapal perikanan Malaysia PKFB 1689, KHF 1971 dan PKFB 1776 pada tanggal 13 Februari 2019 di Selat Malaka, serta antara KRI Tjiptadi 381 milik TNI-AL dan kapal pengawas perikanan Vietnam KN-264 dan KN-21 pada tanggal 27 April 2019 di Laut Natuna.

   Insiden-insiden tersebut sudah pada tahap memprihatinkan karena telah terjadi benturan-beturan yang mengancam keselamatan kapal dan nyawa, sehingga dapat menyebabkan

konflik/penggunaan kekerasan dan mengancam hubungan bilateral. Berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku, proses penegakan hukum antar negara bertetangga di wilayah yang belum ditetapkan batasnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip seperti 'exercise of restraint', proporsional dan tidak terhindarkan, kecuali terhadap negara ketiga. Hal ini dapat dilihat dalam, salah satunya, putusan Arbitral Tribunal Guyana vs Suriname oleh ITLOS. Selain itu dalam Pasal 74 (3) UNCLOS 1982, negara-negara yang berbatasan ZEE-nya perlu membuat suatu 'provisional arrangement of practical nature' yang tidak menghambat dan mempengaruhi delimitasi akhir batas maritim.

Sementara itu, dalam hukum nasional Indonesia, yaitu seperti UU No. 5/1983 tentang ZEE, UU No. 6/1996 tentang Perairan, UU No. 45/2009 jo. UU No. 31/2004 tentang Perikanan tidak diatur mengenai penegakan hukum di wilayah tumpang tindih. Hal ini menyebabkan dilema tindakan aparat penegakan hukum Indonesia di wilayah tersebut sehingga membutuhkan kesamaan pandang yang dituangkan dalam sebuah referensi/panduan nasional. Merujuk pada hal tersebut di atas Kementerian Luar Negeri melalui Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, telah mengadakan serangkaian koordinasi inter-kementerian sejak terjadinya insiden-insiden di atas pada awal tahun 2019 hingga tanggal 29 April 2019 yaitu serta menyusun Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih (undelimited waters). Pedoman dimaksud disusun dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Sebagai pedoman bagi seluruh K/L dalam melakukan penegakan hukum di wilayah tumpang tindih, dan
- Menghindari terjadinya insiden antara aparat penegak hukum RI dengan aparat penegak hukum negara tetangga di wilayah tumpang tindih.

Dalam rangka mendukung penyusunan serta koordinasi K/L dalam implementasi pedoman dimaksud, Kemenko Polhukam telah mengadakan koordinasi dengan K/L terkait melalui rapat koordinasi pada tanggal 29 Mei 2019 yang diikuiti oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, serta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, K/L menyepakati bahwa SOP penting agar seluruh K/L terkait memiliki satu pandangan untuk menghadapi negara tetangga yang berulangkali melakukan pelanggaran di *undelimited waters* dan menyepakati Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih *(undelimited waters)* dimaksud untuk dilaksanakan. Hasil kesepakatan ini dituangkan dalam rekomendasi Kemenko Polhukam kepada K/L terkait mengenai pedoman/Standard Operation Procedure (SOP) dalam menghadapi pelanggaran kedaulatan RI di wilayah undelimited waters pada bulan Juni 2019 penyampaian Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih pada bulan Juli 2019

Kemenko Polhukam bersama dengan Kemlu telah menyampaikan pedoman tersebut kepada K/L terkait dan akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas implementasi serta evaluasi pedoman dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran wilayah di *undelimited waters*. Adapun hambatan terkait SOP tersebut yang ditemui dilapangan ialah Mengingat pedoman adalah produk yang baru diluncurkan, maka masih memerlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L dalam implementasinya. Untuk itu, kedepannya Kemenko Polhukam akan terus melakukan monitoring secara berkala untuk membahas

implementasi serta evaluasi pedoman dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran wilayah di undelimited waters.

2) Penanganan Permasalahan *unresolved segments* perbatasan darat RI-RDTL

Terdapat 2 *unresolved segments* perbatasan darat RI-RDTL yang membutuhkan penyelesaian secara politis, yakni segmen Noel Besi-Citrana dan Bijael Sunan-Oben. Kedua pemerintah sepakat membentuk forum *Senior Official Consultation* (SOC) untuk menyelesaikan *unresolved segments* tersebut dengan Kemlu RI dan RDTL sebagai *focal point.*

Kemenko Polhukam telah memainkan peran penting dalam penyelesaian isu ini melalui pendekatan politik dengan *Chief Negotiatior* RDTL, Xanana Gusmao. Pada pertemuan Menko Polhukam dan *Chief Negotiatior* RDTL tanggal 22 Juli 2019, kedua pihak telah menandatangani *Agreed Principles on the Final Settlement of Land Boundary between the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of Timor Leste.* Adapun untuk daerah Bijael Sunan-Oben sudah clear dan hanya pengaturan Special Arraengement di lapangan. Sedangkan untuk Noel Besi-Citrana masih membahas tindak lanjut pembagian perbatasan secara teknis dengan pihak RDTL.

Terdapat hambatan dalam melakukan penyelesaian penanganan yaitu Penyelesaian pembagian perbatasan memerlukan waktu yang cukup panjang mengingat hasil yang harus mengakomodir kepentingan kedua negara. Untuk itu, Kemenko Polhukam terus berkoordinasi dengan Kemlu untuk memantau perkembangan tindak lanjut penyelesaian pembagian perbatasan dengan pihak RDTL.

INDIKATOR KINERJA IV	JUMLAH IMPLEMENTASI BLUEPRINT APSC 2025

ASEAN *Political-Security Community* (APSC) *Blueprint* atau Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat proses konsolidasi Masyarakat ASEAN utamanya pada Pilar kerja sama politik dan keamanan di ASEAN untuk mewujudkan stabilitas, perdamaian dan ketahanan keamanan di kawasan.

Cetak Biru Masyarakat ASEAN disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand pada tahun 2009 untuk periode 2009-2015, dan dituangkan dalam Deklarasi Cha-am, Hua Hin, tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (Cha-am, Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community). Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2009-2015 memuat 137 langkah aksi yang kemudian diperbaharui kembali dengan Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025, untuk periode 2015-2025 yang memuat 290 langkah aksi. Cetak Biru Masyarakat ASEAN disepakati oleh seluruh negara ASEAN dan menjadi komitmen bersama untuk diimplementasikan baik di tingkat ASEAN dan tingkat nasional masing-masing negara ASEAN. Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025 tersebut terdiri atas 3 karakteristik, 11 elemen, dan 290 langkah aksi yaitu:

1) Komunitas Berbasis Aturan dengan Nilai dan Norma Bersama (*A Rules-based Community of Shared Values and Norms*) terdiri dari 3 elemen;
2) Sebuah Wilayah Terpadu, Damai dan Tangguh dengan Tanggung Jawab Bersama untuk Keamanan Menyeluruh (*A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for Comprehensive Security*) terbagi dalam 6 elemen; dan
3) Kawasan yang Dinamis dan Berpandangan Keluar dalam Dunia yang Semakin Terintegrasi dan Saling Bergantung (*A Dynamic and*

Outward Looking Region in an Increasingly Integrated and Interdependent World) yang dijabarkan dalam 3 elemen.

Langkah aksi Cetak Biru Pilar Polkam ASEAN 2025 memuat kerjasama dalam bidang politik, keamanan, pertahanan dan hukum yang mencakup spektrum yang luas dari permasalahan tradisional dan nontradisional, dari upaya untuk memajukan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), menangani masalah terorisme, menanggulangi bencana alam, dan memberantas korupsi.

Guna mendukung konsolidasi Masyarakat ASEAN dan mengkoordinasikan program-program kerjasama ASEAN di tingkat nasional, pada tahun 2011 telah dibentuk Sekretariat Nasional ASEAN berdasarkan Keppres Nomor 23 tahun 2011 mengenai Susunan Keanggotaan Setnas ASEAN-Indonesia. Berdasarkan Keppres dimaksud, Kemenko Polhukam bertindak selaku Penanggungjawab Pilar Polkam ASEAN. Penanggungjawab Pilar Polkam ASEAN bertugas sebagai koordinator implementasi Cetak Biru Pilar Polkam ASEAN, pumpunan kerjasama Pilar Polkam ASEAN, pengumpul informasi dan pemajuan identitas/*awareness* Masyarakat untuk Pilar Polkam ASEAN. Terkait dengan hal tersebut Menko Polhukam juga bertindak selaku Wakil Indonesia untuk Pertemuan ASEAN *Political Security Council*/Dewan Masyarakat Polkam ASEAN yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun di sela-sela KTT ASEAN. Dalam pertemuan dimaksud Menko Polhukam menyampaikan statement mengenai capaian perkembangan implementasi Cetak Biru Pilar Polkam ASEAN 2025 dan program kerjasama yang menjadi isu prioritas Indonesia dan kawasan.

Dicatat bahwa implementasi langkah aksi Cetak Biru APSC yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam bersama K/L terkait pada tahun 2015 adalah sebanyak 8 langkah aksi, pada tahun 2016 sebanyak 3 langkah aksi dan pada tahun 2017 sebanyak 4 langkah aksi, tahun

2018 sebanyak 9 langkah aksi dan pada tahun 2019 sebanyak 5 langkah aksi dengan realisasi sebagai berikut :

1) Implementasi Blueprint APSC 2025 langkah aksi A.2.5.iv: „Mendukung ASEAN *Intergovernmental Commissions on Human Rights* (AICHR) dalam melaksanakan mandatnya sesuai dengan Kerangka Acuannya"

   Isu HAM merupakan isu lintas pilar dan lintas sektoral yang memerlukan koordinasi komprehensif dalam upaya pemajuan dan perlindungannya di kawasan. AICHR sebagai Badan HAM ASEAN merupakan sebuah forum yang strategis untuk melihat kecenderungan perkembangan HAM di kawasan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia terkait isu-isu HAM yang perlu menjadi perhatian bersama di kawasan.

   Kemenko Polhukam sebagai Koordinator Pilar Polkam Masyarakat ASEAN pada Setnas ASEAN-Indonesia terus berupaya mendukung AICHR dalam melaksanakan mandatnya dengan mengikuti, memantau, dan mengoordinasikan perkembangan isu HAM di tingkat nasional dan kawasan dengan melibatkan AICHR dan K/L terkait untuk pengupayaan solusi atas pemajuan dan perlindungan isu HAM tersebut.

   Dukungan tersebut direalisasikan melalui partisipasi aktif pada Rangkaian Pertemuan Menlu ASEAN yang salah satunya adalah Pertemuan 52nd ASEAN *Foreign Ministers' Meeting* (AMM) tanggal 30 s.d. 31 Juli 2019 di Bangkok, Thailand. Dari partisipasi tersebut, dihasilkan bahwa Para Menlu ASEAN telah menyepakati usulan dilakukannya *review Terms of Reference* (ToR) AICHR dan menugaskan ASEAN SOM untuk menjajaki dibentuknya *Independent Panel of Experts* guna melakukan *review* dimaksud. Sehubungan

dengan hal tersebut, Indonesia perlu mengantisipasi pembahasan isu ini yang mencakup modalitas dan penentuan calon *independen* yang dapat dipertimbangkan sebagai perwakilan RI pada panel dimaksud.

Untuk memantau jalannya pembahasan antisipasi tersebut, Kemenko Polhukam telah menghadiri Rakor Persiapan Awal Pemri terkait *review* ToR AICHR yang diselenggarakan Kemlu tanggal 23 Agustus 2019 di Jakarta. Rakor menghasilkan catatan agar Indonesia dapat fokus pada modalitas mekanisme panel terlebih dahulu sebelum memulai review substansi atas ToR AICHR. Untuk modalitas, rapat menyimpulkan untuk mengajukan opsi mengaktifkan kembali *High Level Panel* yang dulu dibentuk untuk membuat ToR AICHR pada tahun 2009.

Kemenko Polhukam akan terus berkoordinasi bersama Wakil AICHR-Indonesia, Kemlu, dan K/L pemangku kepentingan terkait untuk terus mendukung mandat AICHR.

2) Implementasi *Blueprint* APSC 2025 langkah aksi B.1.2.vii: „Melakukan tinjauan secara berkala mengenai inisiatif yang sudah ada agar sejalan dengan prioritas ADMM dan ADMM-Plus dengan isu-isu keamanan regional yang menjadi perhatian bersama"

ASEAN *Defence Ministers' Meeting* (ADMM) dan ADMM-Plus merupakan forum kerja sama, diskusi, dan koordinasi tingkat Menteri antar Negara Anggota ASEAN untuk membahas isu-isu pertahanan dan keamanan di kawasan.

Banyaknya program yang ditangani dan kurangnya koordinasi pelaporan dari Kemhan selaku *focal point* nasional ADMM dan ADMM-Plus kepada Kemenko Polhukam selaku Koordinator Pilar Polkam Masyarakat ASEAN pada Setnas ASEAN-Indonesia dan K/L terkait menyebabkan progres capaian program dan inisiatif yang

disepakati kurang terpantau. Untuk itu, ditetapkan perlunya diadakan koordinasi dan sinkronisasi informasi dalam rangka mendapatkan gambaran akan perkembangan kerja sama badan sektoral ADMM dan ADMM Plus. Hal ini dicapai melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembahasan Program Kerja Sama Badan Sektoral ASEAN *Defense Ministers' Meeting* (ADMM) dan ADMM Plus tanggal 15 Februari 2019 di Ruang Rapat Srikandi, Kemenko Polhukam. Rakor menghasilkan rekomendasi untuk K/L terkait, yaitu:

- Dubes/Wakil Tetap RI pada ASEAN;
- Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kemhan;
- Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemlu;
- Deputi IV Bidkoor Hanneg, Kemenko Polhukam;
- Deputi Bidang Kerja Sama Internasional, BNPT;
- Sekretaris Utama, BNPB; dan
- Kepala Pusat Kerja Sama Internasional, Mabes TNI

Dalam rangka implementasi langkah aksi dimaksud yang disampaikan beberapa rekomendasi, antara lain:

a) K/L terkait pada kerja sama badan sektoral ADMM dan ADMM Plus agar selalu melihat kembali langkah aksi *Blueprint* APSC 2025 dan *work programmes* di masing-masing kerja sama dalam menyusun program kerja sama di tingkat nasional maupun internasional;

b) Mengingat isu yang dibahas dalam mekanisme ini bersifat lintas badan sektoral dan lintas pilar utamanya isu *counter terrorism, cybersecurity, maritime security, dan disaster relief*, kiranya K/L terkait yang menangani isu serupa di ASEAN perlu selalu meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat nasional

agar kesepakatan yang dicapai pada berbagai forum sinkron dan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia;

c) Kemenko Polhukam sebagai koordinator Pilar Polkam ASEAN pada Setnas ASEAN-Indonesia akan terus menfasilitasi langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L dalam kerja sama ASEAN maupun ASEAN dengan Mitra Wicara.

Kemenko Polhukam berpartisipasi aktif dalam Rapat Persiapan Delegasi RI dan menjadi Delegasi RI pada Pertemuan 13th ASEAN *Defence Ministers' Meeting* (ADMM) tanggal 10 s.d. 12 Juli 2019 di Bangkok, Thailand, dengan hasil sebagai berikut:

a) Pertemuan telah membahas rencana Keketuaan ASEAN pada ADMM- *Plus Expert Working Groups* (EWGs) untuk periode 2020-2023, mengadopsi 12th ASEAN *Militaries* 2-*year Activity Work Plan* 2019-2021, dan mengadopsi juga 6 *concept paper inisiatif* ADMM yang telah di- *endorse* pada Pertemuan ADSOM, antara lain:

- *Guidelines for the Assessment of the ADMM initiatives*,
- *Expansion of the ASEAN Direct Communication Infrastructure in the ADMM Process to the Plus Countries*,
- *ASEAN Centre of Military Medicine* (ACMM) untuk menjadi *cross- sectoral body* di bawah Piagam ASEAN,
- *Terms of Reference (ToR) ASEAN Our Eyes* yang diinisiasi Indonesia,
- draft *ToR for Hosting Activities under the Framework of the ADMM Wide Education and Training Exchanges/AETEs*, dan

- *Joint Statement by the ADMM Plus Defence Ministers on Advancing Partnership for Sustainable Security*.

b) Pertemuan menyampaikan sektor perikanan sebagai sektor ekonomi bernilai tinggi dan menekankan pentingnya aksi tegas atas pelanggaran hukum yang dilakukan para pelaku di sektor perikanan. Sehubungan dengan itu, Thailand mendorong agar Negara Anggota ASEAN dapat membuat regulasi yang melibatkan institusi pertahanan dalam penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) dan juga memasukkannya ke dalam wadah kerja sama pertahanan ASEAN.

Kemenko Polhukam akan terus meningkatkan koordinasi langsung dengan K/L terkait pada kerangka badan sektoral ADMM dan ADMM-Plus untuk saling berbagi informasi sehingga dapat memantau perkembangan program-program ADMM yang disetujui bersama di tingkat ASEAN dan memastikan tindak lanjutnya di tingkat nasional.

3) Implementasi *Blueprint* APSC 2025 langkah aksi B.6.1.iv:

Mengintensifkan negosiasi antara ASEAN dan RRT untuk mengesahkan COC secepatnya dan memastikan implementasinya secara penuh dan efektif" *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC) merupakan mandat dari dokumen *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) yang telah disepakati antara Negara Anggota ASEAN dan RRT pada tahun 2002. Dokumen CoC bertujuan untuk mengatur tata-hubungan antara lain menghindari dan mengelola konflik apabila terjadi antara Negara Anggota ASEAN dan RRT di Laut China Selatan (LCS). Pada akhir tahun 2018, RRT menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan proses negosiasi

CoC ini dalam waktu tiga tahun yaitu 2021, namun demikian hal tersebut merupakan *aspirational timeline* dan bukan sebagai suatu batas waktu (*deadline*).

Kemenko Polhukam berpartisipasi aktif pada Rangkaian Pertemuan 29th ASEAN-China *Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea* (JWG on DOC) yang diselenggarakan tanggal 20 s.d. 22 Juli 2019 di Penang, Malaysia, dengan hasil sebagai berikut:

a) Mengingat bahwa pertemuan berikutnya yaitu 30th ASEAN-China JWG on DOC akan memulai tahapan *second reading* yang membahas draft teks CoC secara substantif, maka kiranya Pemerintah Indonesia perlu melakukan identifikasi argumen dan posisi RI terhadap ketentuan yang menjadi perhatian Indonesia untuk disampaikan pada pertemuan dimaksud. Selain itu, pembahasan legal nature CoC perlu dilakukan pula.
b) Dalam rangka persiapan tahapan second reading pula, kiranya mekanisme konsultasi dengan K/L terkait khususnya dalam hal implementasi penegakan hukum di laut perlu diintensifkan dalam rangka mematangkan posisi Indonesia dalam negosiasi berikutnya.
c) Mengingat adanya posisi keberatan Viet Nam untuk melanjutkan pertemuan *second reading* CoC dan menunggu posisi resmi pada pertemuan AMM, perlu diantisipasi kemungkinan Viet Nam mengangkat keprihatinannya terhadap insiden di sekitar Vanguard Bank pada pertemuan PMC+1 dengan RRT dan desakannya untuk menunda lanjutan *second reading*.

Untuk memantau perkembangan tersebut lebih lanjut utamanya poin pengamatan (c), Kemenko Polhukam berpartisipasi aktif pada Rangkaian Pertemuan Menlu ASEAN yang salah satunya adalah Pertemuan 52nd AMM tanggal 30-31 Juli 2019 di Bangkok,

Thailand. Dari partisipasi tersebut, dihasilkan bahwa hampir seluruh Negara Anggota ASEAN khususnya Viet Nam menyampaikan *concern* atas situasi terkini di LCS yang menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan di area tersebut. Pertemuan meminta agar kedua belah pihak dan semua negara *Claimant (Claimant State*) dapat saling menahan diri dan menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1992. Kebebasan bernavigasi di LCS perlu ditegakkan. Selain itu, negara-negara non-ASEAN juga menyampaikan harapannya agar proses penyusunan CoC dapat segera diselesaikan dan dilakukan secara transparan.

Kemenko Polhukam dapat terus memantau tindak lanjut dari catatan pengamat tersebut untuk memastikan implementasi langkah aksi dimaksud dan ddiharapkan dapat terus memfasilitasi dan/atau terlibat aktif dalam progres negosiasi COC antara ASEAN dan RRT.

4) Implementasi *Blueprint* APSC 2025 langkah aksi A.1.5: 'Peningkatan kesadaran masyarakat pada ASEAN'

Sebagai Koordinator Pilar Politik dan Keamanan Masyarakat ASEAN pada Setnas ASEAN-Indonesia, Kemenko Polhukam bertugas untuk mendiseminasikan informasi mengenai perkembangan kerja sama ASEAN dan pencapaian Visi Masyarakat ASEAN 2025 utamanya pada Pilar Politik dan Keamanan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat pada ASEAN.

Selama tahun 2019, Kemenko Polhukam menyelenggarakan 2 kegiatan Diseminasi Informasi Masyarakat ASEAN yaitu:

a. Tanggal 23 Agustus 2019 di Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Sumatera Selatan. Pada kegiatan diseminasi ini kami mengambil tema “Masyarakat ASEAN: Tantangan Politik dan Keamanan di Kawasan” dan melibatkan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memaparkan ancaman radikalisme, *violent extremism*, dan terorisme serta upaya penanggulangannya di tingkat nasional dan ASEAN.

b. Tanggal 23 September 2019 di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, DIY. Pada kegiatan diseminasi ini dan atas dasar permintaan universitas, kami mengambil tema "Krisis Kemanusiaan dalam Politik Internasional" yang utamanya berkaitan dengan isu pengungsi Rohingya Rakhine State, Myanmar. Kegiatan juga melibatkan narasumber dari *think tank* dan akademisi yaitu National Program Officer JRS Indonesia dan Ketua Program Studi Hubungan Internasional UII.

Kegiatan berjalan lancar dan diapresiasi oleh mitra universitas sebagai upaya memberikan pemahaman dan semangat kepada para generasi muda di daerah dalam menghadapi tantangan di kawasan dan memaksimalkan potensi yang ada.

Kemenko Polhukam terus melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan Pusat Studi ASEAN (PSA) dan *focal point* nasional badan sektoral ASEAN untuk isu-isu yang menjadi prioritas baik di tingkat nasional dan regional.

5) Implementasi *Blueprint* APSC 2025 langkah aksi B.3.1.i:

Mengupayakan peningkatan *Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) 2004 menjadi suatu traktat ASEAN" Langkah aksi tersebut diimplementasikan dengan partisipasi aktif Kemenko Polhukam pada Pertemuan 9th *Senior Officials Meeting on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (SOMMLAT) tanggal 23 April 2019 yang juga diselenggarakan secara *back-to-back* dengan Pertemuan 6th *Attorney General/Ministers of Justice and Minister of Law Meeting on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (AMAG

MLAT) yang diikuti oleh Bapak Menko Polhukam tanggal 25 April 2019 di Yogyakarta. Dari partisipasi tersebut, dihasilkan sebagai berikut:

a. Dengan diangkatnya status ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* (ASEAN MLAT) menjadi dokumen ASEAN *Treaty*, maka diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang penting dalam menanggulangi kejahatan transnasional yang bersifat *cross-cutting* dan memerlukan kolaborasi dan koordinasi diantara berbagai institusi penegak hukum baik di tingkat nasional dan regional;
b. Dengan pengubahan nama dan sekaligus menjadikan *Senior Officials Meeting of the Central Authorities on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (SOM MLAT) dan ASEAN *Ministers/Attorney General Meeting of the Central Authorities on Mutual Legal Assistance in*;
c. *Criminal Matters* (AMAG MLAT) sebagai badan sektoral baru di bawah pilar Polkam ASEAN, maka dipandang perlu untuk memastikan koordinasi antar badan sektoral di tingkat nasional terkait dalam upaya pencapaian implementasi langkah aksi Cetak Biru Pilar Polkam ASEAN 2025 pada bidang kerja sama hukum.

Kemenko Polhukam akan terus mendorong dan mengawal perkembangannya agar penyusunan panduan internal ini dapat segera diselesaikan antar K/L (Kemlu dan Kemkumham c.q. Ditjen Imigrasi).

- **Sasaran Strategis : Terwujudnya daya Dukung Manajemen Unit Organisasi yang berkualitas**

INDIKATOR KINERJA I	NILAI AKUNTABILITAS

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP ialah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Indikator nilai SAKIP Kedeputian Bidkoor Polugri Kemenko Polhukam merupakan indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi Kedeputian Bidkoor Polugri Kemenko Polhukam atas kaidah-kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target indikator ini pada tahun 2019 adalah mendapat predikat BB (75.00). Predikat ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi SAKIP seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam yang dilaksanakan oleh tim auditor pada Inspektorat Kemenko Polhukam. Aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian SAKIP adalah aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja serta

Pencapaian Sasaran Kinerja. Setiap unit eselon I diharuskan untuk melakukan evaluasi terhadap SAKIP masing-masing unit kerjanya.

Berdasarkan Nota Dinas No B-262/PW.03.00/8/2019 Nilai AKIP Kedeputian Bidkoor Polugri Polhukam pada tahun 2019 sebesar 76,08 dengan kategori BB yaitu sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kedeputian Bidkoor Polugri Kemenko Polhukam telah mengimplementasikan manajemen kinerja secara baik pada unit organisasinya walaupun masih terdapat banyak evaluasi yang akan ditindaklanjuti kedepannya.

Table Perbandingan Nilai SAKIP 2017, 2018 dan 2019

Nilai SAKIP	2017	2018	2019
	75,51	75,53	76,08

INDIKATOR KINERJA II	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN (SKALA LIKERT I-5)

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalamnilai maupun indeks.

Pelaksanaan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan sepanjang tahun 2019. Pengukuran perhitungan Nilai

/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas:

1) Aspek Internal;

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan;
- Layanan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

2) Aspek Eksternal.

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri .

Kriteria Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan:

1 → Pelayanan Tidak Baik

2 → Pelayanan Kurang Baik

3 → Pelayanan Cukup

4 → Pelayanan Baik

5 → Pelayanan Sangat Baik

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri selama periode Triwulan IV tahun 2019 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Surat keluar dan surat masuk di Deputi Bidkoor Pollugri;

- Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar;
- Pengisian Rencana dan realisasi Sasaran Kinerja Pegawai hardcopy dan pengisisan pada http://simpeg.polkam.go.id;
- Membuat validasi data pegawai di lingkungan Deputi Bidkoor Pollugri, Data Inventaris Ruangan dan mengikuti kegiatan Bimtek SAKIP dan PMPRB Unit Kerja.

Berdasarkan perhitungan Nilai /Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan sepanjang tahun 2019 diperoleh hasil 4 yaitu dengan kategori Pelayanan Baik.

Indeks kepuasan ini berguna sebagai tolak ukur Kinerja Bagian Umum yang selanjutnya akan menjadi evaluasi dalam rangka penilaian kualitas bagian Umum. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi dimana tujuan akhir yang akan dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan para pegawai. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan para pegawai dapat juga dijadikan acuan keberhasilan atau tidakinya pelaksanaan program yang dilaksanakan.

C. Efisiensi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh 33 orang, yaitu :

- 1 orang Eselon I sebagai Deputi
- 4 orang Esellon II sebagai Asisten Deputi
- 1 orang Esellon II sebagai Sekretaris Deputi
- 8 orang Esellon III sebagai Kepala Bidang

- 2 orang Esellon III sebagai Kepala Bagian
- 4 orang Esellon IV sebagai Kepala Sub Bagian
- 6 orang analis bidang Politik Luar Negeri dan
- 7 orang tenaga administrasi bidang Politik Luar Negeri.

Jumlah sumber daya manusia tersebut belum mencapai kondisi ideal, dimana unit kerja eselon II hanya memiliki 1 atau 2 orang analis. Demikian pada unit kerja Sekretaris Deputi masih terdapat posisi jabatan yang kosong, yaitu perencana dan pengevaluasi program dan kinerja.

Namun dengan keterbatasan sumber daya tersebut Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berusaha mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh sumber daya manusia yang ada agar tetap mampu memenuhi target kinerja dan target saasaran strategis tahun 2019.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran, Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mengedepankan aspek esfisiensi dan efektifitas biaya, yaitu dengan pemilihan akomodasi yang layak namun memiliki harga yang lebih ekonomis.

D. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran revisi kegiatan Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 11.850.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), per periode Tahunan TA 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 telah diserap sebesar Rp 10.323.433.696,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Secara kualitas dana yang terserap untuk mendukung kegiatan tersebut sebesar 87,12% dengan perincian sebagai berikut:

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	PAGU	REALISASI	SISA	% Realisasi (Blj/Pagu)
5907	Sekretariat Deputi Koord. Politik Luar Negeri	1.500.000.000	1.333.827.138	168.172.862	88,79
2454	Koord. Kerja Sama Amerika dan Eropa	2.701.808.000	2.393.035.488	308.772.512	88,57
2455	Koord. Kerja Sama ASEAN	2.964.924.000	2.811.708.682	153.215.318	94,83
2456	Koord. Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika	2.893.979.000	2.452.929.810	441.049.190	84,76
5896	Koord. Kerja Sama Organisasi Internasional	1.789.289.000	1.333.932.578	455.356.422	74,55
	Total Kedeputian 2 =	11.850.000.000	10.323.433.696	1.526.566.304	87,12

Dalam mencapai sasaran strategis kinerja tahun 2019, Kedeputian Bidkoor Pollugri didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	PAGU	REALISASI	% Realisasi
1. Meningkatnya Kualitas Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Indonesia	10.350.000.000	8.989.606.558	86,86%
2. Terwujudnya daya Dukung Manajemen Unit Organisasi yang berkualitas	1.500.000.000	1.333.827.138	88,79
TOTAL KEDEPUTIAN II 2019	**11.850.000.000**	**10.323.433.696**	**87,12%**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahunan TA 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran Capaian Kinerja secara makro maupun mikro dalam pengelolaan Unit Kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam mencapai sasarn strategis meningkatnya kualitas diplomasi dan kerja sama luar negeri Indonesia dan terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas. LAKIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahunan TA 2019 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders)* dalam pelaksanaan pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kemenko Polhukam bidang Politik Luar Negeri. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana menjadi tolok ukur agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahunan TA 2019 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun untuk dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat. Laporan ini juga digunakan dalam mendukung penyusunan rencana kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam mencapai Rencana Strategis 2020 - 2024.

Jakarta, Januari 2020
Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri

Lutfi Rauf

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B- 134 /LN00.00/5/2019 Jakarta, 8 Mei 2019
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pokok-pokok Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Upaya Revisi Tata Ruang Kepulauan Natuna dan Rencana Penetapan *Global Geopark* UNESCO, Bandung, 22 April 2019

Yth. Para Pejabat pada Daftar Terlampir

Merujuk rapat koordinasi Kemenko Polhukam pada tanggal 22 April 2019 yang membahas tindak lanjut upaya revisi tata ruang Kepulauan Natuna dan rencana penetapan *Global Geopark* UNESCO, bersama ini dengan hormat disampaikan pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut:

1. Pada hari Senin, 22 April 2019, Kedeputian Bidkoor Pollugri c.q. Keasdepan Koordinasi Kerma Aspasaf dan Keasdepan Koordinasi Kerma Amerop telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Upaya Revisi Tata Ruang Kepulauan Natuna dan Rencana Penetapan *UNESCO Global Geopark*. Rapat dihadiri antara lain oleh wakil-wakil dari Kemenko Kemaritiman, Kemlu, Kemhan, Kemendagri, Kemen ATR/BPN, Bappenas, Asrenum TNI, Setda Pemprov Riau, Dinas Pariwisata Kab. Natuna, Dinas PU Kab. Natuna, Badan Pengelola Geopark Natuna, Bappeda Kab. Natuna, Universitas Padjadjaran Bandung, serta STIEPAR Bandung.

2. Tujuan rakor adalah membahas percepatan proses revisi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kepulauan Natuna dan mensinergikan langkah K/L terkait bagi pengusulan Kepulauan Natuna sebagai *Geopark* dunia melalui mekanisme *UNESCO Global Geopark.*

3. Rakor telah menghadirkan para narasumber dari BPPK Kemlu, Pusat Geologi Universitas Padjadjaran Bandung, Dit. Wilhan Kemhan dan wakil dari Pemkab Natuna.

4. Hal-hal yang mengemuka dalam rapat antara lain sebagai berikut:

   a. Kapus P2K Multilateral BPPK Kemlu menyampaikan hasil kunjungan ke Guam dan Hawaii terkait tata ruang dan wilayah serta pentingnya evaluasi penyusunan RUTR Natuna dan upaya percepatan prosesnya. Disampaikan pula bahwa Kemlu akan terus mendukung proses pencalonan Natuna sebagai *UNESCO Global Geopark* melalui upaya diplomasi serta melakukan promosi investasi ke Natuna dari dalam dan luar negeri.

   b. Kepala Pusat Geologi Universitas Padjadjaran menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kunjungan Presiden *UNESCO Global Geopark, Geopark* Natuna memiliki potensi yang luar biasa, dan untuk merealisasikan proyek Natuna sebagai *UNESCO Global Geopark* diperlukan teknik, strategi dan waktu dalam menerapkan langkah-langkah persiapan menuju *UNESCO Global Geopark* yang telah direkomendasikan (terlampir rekomendasi langkah-langkah strategis persiapan menuju *UNESCO Global Geopark*).

prioritas pertahanan Indonesia di wilayah utara. Telah ada kebijakan pembangunan pertahanan yang mengatur dan menetapkan kawasan militer untuk pengamanan darat, perairan laut dan wilayah udara. Peta wilayah pertahanan tersebut sudah dibahas bersama Pemkab Natuna, kecuali di beberapa titik bagi penempatan radar dan *long range camera*.

d. Wakil dari Pemkab Natuna menyampaikan pandangan serupa, agar dalam revisi dan pemetaan pengembangan tata ruang Natuna diatur pembagian kewenangan yang jelas terkait tanah, masalah air, perijinan dan sebagainya. Juga perlu adanya kejelasan dan jaminan usaha bagi investor, karena pengembangan Natuna tidak akan mencukupi jika hanya mengandalkan APBD).

e. Wakil Bappenas menyampaikan saat ini sedang disusun pedoman Rencana Aksi Nasional Percepatan Pengembangan Wilayah Natuna sebagai prioritas nasional.

f. Wakil dari Kemendagri menyampaikan ada banyak kepentingan terkait kawasan Natuna, sehingga semangat menjadikan Natuna sebagai *Geopark* dunia perlu disertai dengan *'business plan'* yang jelas. Disampaikan Perpres Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan taman Bumi (*Geopark*) juga mengatur perihal destinasi wisata yang dalam implementasinya memerlukan keterlibatan pihak swasta.

g. Rakor mencatat hal-hal penting lain terkait tenggat waktu pengusulan sebagai geopark dunia, alokasi dana, kesiapan SDM, serta *dossier* yang perlu terus dilengkapi.

Catatan dan saran:

5. Rakor sepakat untuk segera melakukan revisi RUTR wilayah Natuna guna menghasilan *Master Plan* yang komprehensif dan mengakomodasi keinginan menjadikan Kepulauan Natuna sebagai *Geopark* dunia.
6. Sejauh ini pemetaan tata ruang yang sudah disusun oleh Pemda Natuna dapat menjadi input awal bagi *Master Plan* untuk selanjutnya dituangkan dalam revisi RUTR yang ditargetkan rampung pada November 2019.
7. Rapat juga membahas tentang pembuatan *'concept paper'* yang memuat aspek ekonomi (*eco-tourism*), pertahanan, pemerintahan, lingkungan, cagar budaya, budaya/masyakat setempat dan ekosistem secara umum di wilayah Kepulauan Natuna dan memutuskan juga untuk membuat serta membahas konsep dimaksud.
8. *'Concept paper'* dimaksud juga dapat menjadi 'payung' dari penetapan Natuna sebagai *UNESCO Global Geopark*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Bidkoor Pollugri
Asdep Koordinasi Kerma Aspasaf

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Dr. Pribadi Sutiono

Tembusan:
Sesmenko Polhukam.

Lampiran Surat
Nomor : B- 134/LN00.00/5/2019
Tanggal : 8 Mei 2019

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT

1. Asrenum Panglima TNI;
2. Bupati Kabupaten Natuna;
3. Rektor UMRAH;
4. Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Geopark, Museum dan Sarana Prasarana, Kemen ESDM;
5. Kepala Pusat Survei Geologi Badan Geologi Kemen ESDM;
6. Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO;
7. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Kemenko Polhukam;
8. Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional, Kemenko Polhukam;
9. Sekretaris Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Kemenko Kemaritiman;
10. Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Kemdagri;
11. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kemdagri;
12. Direktur Sosial Budaya OINB, Kemlu;
13. Kepala P2K Multilateral BPPK, Kemlu;
14. Direktur Wilayah Pertahanan, Kemhan;
15. Direktur Penataan Kawasan, Ditjen Tata Ruang Kemen ATR/BPN;
16. Direktur Pertahanan dan Keamanan, KemenPPN/Bappenas;
17. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, KemenPPN/Bappenas;
18. Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan, KemenPPN/Bappenas;
19. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
20. Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna;
21. Kepala Dinas Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Natuna;
22. Kepala Dinas PU, Pemerintah Kabupaten Natuna;
23. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna;
24. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Kabupaten Natuna;
25. Kepala Pusat Geologi Universitas Padjajaran Bandung;
26. Ketua STIEPAR YAPARI u.p. Tim Kajian Natuna;
27. Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Natuna.

a.n. Deputi Bidkoor Pollugri
Asdep Koordinasi Kerma Aspasaf

Dr. Pribadi Sutiono

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : B- 61 /LN00.00/3/2019
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penunjukan *Focal Point* dalam rangka Penyusunan Rencana Tata Ruang Kepulauan Natuna

Jakarta, 1 Maret 2019

Yth. Para Pejabat pada Daftar Terlampir

Merujuk rapat koordinasi Kemenko Polhukam pada tanggal 21 Februari 2019 yang membahas rencana tata ruang Kepulauan Natuna, bersama ini dengan hormat disampaikan rekomendasi rapat sebagai berikut :

1. Rapat menyepakati bahwa pengembangan *Geopark UNESCO* Kepulauan Natuna merupakan prioritas nasional sebagai bagian dari pembentukan tata ruang sistem pertahanan NKRI yang mendukung pengembangan perekonomian, pariwisata dan konservasi alam Kepulauan Natuna.
2. Ditargetkan pada bulan Juli 2019 Indonesia akan menyampaikan *Letter of Intent* (LoI) kepada UNESCO terkait usulan Kepulauan Natuna sebagai situs *Geopark UNESCO* dan permohonan kunjungan tim UNESCO ke Natuna sekitar bulan Juni-Agustus 2019. Adapun target pendaftaran Kepulauan Natuna sebagai situs *Geopark UNESCO* adalah bulan November 2019.
3. Dalam rangka mencapai target tersebut, rapat merekomendasikan penunjukan *focal point* dari Kementerian/Lembaga terkait yang bertugas membantu upaya revisi tata ruang Natuna yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemkab Natuna serta penyusunan *master plan geopark* termasuk pemetaan zona pertahanan/militer di Kepulauan Natuna.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya masing-masing Kementerian/Lembaga dapat menyampaikan nama personil yang ditunjuk sebagai *focal point* kegiatan dimaksud.
5. Diharapkan nama personil dapat disampaikan melalui surat tertulis kepada Deputi Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam melalui faks (021) 3513561 dan email pollugri@gmail.com. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Ni Putu Elvina (Hp. 081297484259).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidkoor Pollugri

Lutfi Rauf

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
2. Sesmenko Polhukam;
3. Bupati Kabupaten Natuna;
4. Deputi Bidkoor Kumham;
5. Deputi Bidkoor Hanneg.

Lampiran Surat
Nomor : B- 61 /LN00.00/3/2019
Tanggal : 1 Maret 2019

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIMI SURAT

1. Asrenum Panglima TNI;
2. Sekretaris Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Kemenko Kemaritiman;
3. Direktur Wilayah Pertahanan, Kemhan;
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Pusat P2K) Multilateral, BPPK Kemlu;
5. Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Kemdagri;
6. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kemdagri;
7. Direktur Penataan Kawasan, Ditjen Tata Ruang Kemen ATR/BPN;
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Kepala Dinas Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Natuna;
10. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna;
11. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Kabupaten Natuna.

Deputi Bidkoor Pollugri

Lutfi Rauf

puskom kemlu n 07920__R-00095/Tokyo/190329__WLI p@190330085853 SUG

Agd. 07920

SEGERA

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
TOKYO

BERITA RAHASIA

SUBBAG PERSANDIAN
KEMENKO POLHUKAM RI
RAHASIA MASUK

No. Agd	Tgl Jam	Paraf
108	30/3/19 20.00	

Kepala Perwakilan RI

Arifin Tasrif
Duta Besar LBBP

SIMPANLAH BERITA RAHASIA INI SEBELUM SAUDARA MENINGGALKAN RUANGAN
KELALAIAN SAUDARA BERAKIBAT KERUGIAN BAGI NEGARA

Nomor	:	**R-00095/Tokyo/190329**
Kepada Yth.	:	Menko Polhukam RI, Menteri Luar Negeri RI
Info Yth.	:	Wamenlu, Dirjen Aspasaf Kemlu, Deputi Bidkoor Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Kepala BPPK, Kemlu, dan Dir. Astimpas Kemlu
Dari	:	Duta Besar RI Tokyo
Jumlah	:	**4** Halaman
Perihal	:	Laporan Pelaksanaan Pertemuan Penjajagan Forum Konsultasi Bilateral Menko Polhukam RI-*National Security Secretariat* (NSS) Jepang pada 25-26 Maret 2019 di Tokyo, Jepang

Ringkasan Berita

1. Delegasi Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Deputi Bidkoor Pollugri dan didampingi oleh Asdep Koordinasi Kerma Aspasaf dan Analis Pollugri bidang Aspas telah melaksanakan Pertemuan Penjajagan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Menko Polhukam RI-*National Security Secretariat (NSS)* pada 25-26 Maret 2019 di Tokyo, Jepang.
2. Pertemuan merupakan tindak lanjut dari hasil beberapa kali kunjungan NSS ke Indonesia dan dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi format dan isu-isu keamanan yang terus berkembang dewasa ini sebagai agenda pembahasan forum konsultasi bilateral kelak.
3. Dalam kesempatan pertemuan, pihak Jepang telah menyampaikan *briefing note* mengenai perkembangan di kawasan Laut China Timur dan Laut China Selatan serta masalah stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik.

Merujuk perihal tersebut pada pokok berita, bersama ini dengan hormat disampaikan laporan pelaksanaan Pertemuan Penjajagan Forum Konsultasi Bilateral Menko Polhukam RI-*National Security Secretariat (NSS)* pada 25-26 Maret 2019 di Tokyo, Jepang sebagai berikut: